



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Aur No. 1 Telp. (0751) 27206 - 29675 Fax. 29675 Padang
http : //www.sumbarprov.go.id. e-mail: pol pp@sumbarprov.go.id



INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT
2. Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
3. Fungsi :
 1. Penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 3. Penyelenggaraan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Penyelenggaraan koordinasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
 5. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 6. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASLINE	FORMULA PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Tujuan : Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah	74	Perhitungan indeks penegakan Perda didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai masing masing sub indikator dengan bobotnya. Capaian penyelenggaraan tahapan penegakan Peraturan Daerah dari awal sampai akhir, dengan 4 sub indikator: 1.Tindaklanjut laporan pengaduan pelanggaran perda (10%) 2.Penyelesaian Penyelidikan (60%) 3.Penyidikan yang menjadi penuntutan (15%) 4.Execution Rate (15%)	Bidang PPUD Satpol PP Prov Sumbar
		2 Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	74%	Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dibagi dengan jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi dan dikali 100%. Perbandingan jumlah pengaduan yang diselesaikan terhadap jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk. Pengaduan yang dimaksud adalah pengaduan dari pihak eksternal dan internal.	Bidang TUTM Satpol PP Prov Sumbar
		3 Persentase kabupaten/ kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	84,21%	Jumlah kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dibagi Jumlah kabupaten/kota yang ada dan dikali 100%. Perbandingan Kabupaten/Kota yang aktif menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat terhadap Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat. Kabupaten/Kota yang aktif ditentukan oleh 4 aspek yaitu: 1. Kelembagaan (30%) 2. Sarana dan Prasarana (15%) 3. SDM (25%) 4. Pelaksanaan tugas (30%)	Bidang Linmas dan Damkar Satpol PP Prov Sumbar

